

# **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENURUNAN STUNTING DI DESA PACING KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR**

Daffa Fadila Satriatama

NPP. 32.0517

*Asdaf Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: [32.0517@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0517@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: H. Ismunarta, S.Sos, M.Si

## **ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *In Pacing Village, Padas District, Ngawi Regency, the prevalence rate of stunting is not in accordance with the 2020–2024 RPJMN target of 14%.*

**Purpose:** *This study aims to analyze the implementation of Collaborative Governance in the effort to reduce stunting in Pacing Village, identify the inhibiting factors, and formulate strategies to address these challenges. Method:* *The study employs a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as in-depth interviews, documentation, and field observations. Result:* *The results show that the Collaborative Governance process has been implemented through three key stages: face-to-face dialogue, trust building, and shared commitment. Active involvement of the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS), village midwives, Posyandu cadres, the Family Welfare Movement (PKK), and community leaders has been crucial. However, there are challenges, including weak inter-sectoral communication, limited human resource capacity, low public literacy, and the absence of private sector participation through Corporate Social Responsibility (CSR) programs. Conclusion:* *To improve the effectiveness of Collaborative Governance in Pacing Village, it is recommended to expand stakeholder involvement by encouraging private sector collaboration through CSR, develop village-level Standard Operating Procedures (SOPs) that regulate collaboration mechanisms, strengthen local human resources, and utilize digital platforms for broader communication and education.*

**Keywords:** *Collaborative Governance, Stunting Reduction, Collaboration, Pacing Village, Local Government.*

## **ABSTRAK**

**Permasalahan (GAP):** *Di Desa Pacing Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi angka prevalensi stunting belum sesuai dengan target RPJMN 2020–2024 sebesar 14%. Tujuan:* *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Collaborative Governance dalam upaya penurunan stunting di Desa Pacing, mengidentifikasi faktor penghambatnya, serta merumuskan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode:* *Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi langsung di lapangan. Hasil/Temuan:* *Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Collaborative Governance telah diterapkan melalui tiga tahapan penting, yaitu dialog tatap*

muka, pembangunan kepercayaan, dan komitmen bersama. Keterlibatan aktif dari Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS), badan desa, kader Posyandu, PKK, dan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam pelaksanaan program. Namun demikian, masih ditemukan kendala seperti komunikasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya literasi masyarakat, serta belum terlibatnya sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). **Kesimpulan:** Untuk meningkatkan efektivitas *Collaborative Governance* di Desa Pacing, disarankan adanya pelibatan lebih luas dari sektor swasta melalui CSR, penyusunan SOP khusus di tingkat desa yang mengatur mekanisme kolaborasi, serta penguatan kapasitas SDM lokal dan pemanfaatan teknologi digital sebagai media komunikasi dan edukasi yang lebih luas.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance*, *Stunting*, Kolaborasi, Desa Pacing, Pemerintah Daerah.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

*Stunting* yang disebabkan oleh kekurangan gizi adalah salah satu masalah gizi utama yang dihadapi secara global terutama di negara-negara miskin dan berkembang (Unicef, 2013). Masalah ini tidak hanya mengganggu pertumbuhan anak, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan perkembangan mereka dalam jangka panjang (Lewit, 1997; Kusharisupeni, 2002). Masalah *stunting* juga didefinisikan oleh WHO (*World Health Organization*) sebagai gangguan tumbuh kembang yang dialami anak-anak akibat gizi buruk, infeksi yang sering berulang, serta kurangnya stimulasi psikososial yang memadai (Juniati dkk., 2023).

Dalam konteks penanganan isu kesehatan yang kompleks seperti *stunting*, pendekatan *collaborative governance* menjadi sangat penting, sebab masalah tersebut dikategorikan sebagai *wicked problem* yang tidak dapat diselesaikan secara linier oleh satu aktor saja (Head & Alford, 2015). *Stunting* dikaitkan dengan kondisi lingkungan yang buruk dan kurangnya rangsangan psikososial. *Stunting* dapat menghambat perkembangan otak anak. Kecerdasan dan prestasi akademik mereka menurun setelah dewasa, dan mereka juga berisiko terkena penyakit metabolik (Dwi dkk., 2019). Hal ini juga harus disesuaikan dengan strategi nasional dimana upaya untuk mempercepat penurunan angka *stunting* dengan mendorong langkah-langkah seperti meningkatkan kapasitas kepemimpinan untuk program penurunan angka *stunting* yang saat ini dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, pemerintahan provinsi, kabupaten kota, dan pemerintah kecamatan/desa. (Nur Amanda, 2023). Sejalan dengan itu, konteks negara berkembang menuntut inovasi dalam model tata kelola kolaboratif, di mana sektor pemerintah perlu bersinergi dengan masyarakat sipil dan sektor privat agar pelayanan kesehatan lebih efektif dan inklusif (Nwanko & Aiyeku, 2020), terutama untuk menjamin efektivitas intervensi

lintas kelembagaan, yang menurut Rasanathan et al. (2017) bergantung pada tata kelola pemerintahan yang mengedepankan kepemimpinan kolektif, keselarasan misi, serta pembagian peran yang jelas.

Pemerintahan yang bersifat inklusif, transparan, dan bertanggung jawab merupakan fondasi utama bagi terciptanya stabilitas serta pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia. Menurut Muhadam Labolo (2014), Tata kelola pemerintahan tidak hanya terbatas pada urusan administratif, tetapi juga mencakup partisipasi aktif masyarakat dan pihak ketiga, sembari tetap menghormati nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dituntut untuk terus memperkuat kelembagaan dalam kerangka demokrasi dan meningkatkan kapasitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan seluruh elemen masyarakat. Tanggung jawab dalam membangun tata kelola pemerintahan atau *collaborative governance* yang baik juga berada di tangan pemerintah daerah, bukan semata tanggung jawab pemerintah pusat. *Collaborative governance* adalah pendekatan pengelolaan pemerintahan yang melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara secara langsung. Pendekatan ini berfokus pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik dan program publik (Ansell dan Gash, 2008).

Sebagai salah satu prioritas pembangunan, Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan penurunan prevalensi *stunting* menjadi 14% pada tahun 2024 (Bappenas, 2020). Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023, angka *stunting* di Negara Indonesia berada pada angka 21,6% ditahun 2022 menjadi 21,5% ditahun 2023. (Lubis dkk., 2023). Untuk itu, diterbitkan regulasi seperti Permenkes No. 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak guna memantau pertumbuhan anak secara akurat. Selain intervensi pemerintah, partisipasi masyarakat juga penting dalam penanggulangan *stunting*. Namun demikian, masih ada desa seperti di Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi yang belum mencapai target, menegaskan pentingnya konvergensi dan keterlibatan desa dalam strategi penurunan *stunting* secara berkelanjutan.fnwa

**Tabel 1.1 Jumlah Balita *Stunting* di Kecamatan Padas Tahun 2022-2024**

No	Desa	2022		2023		2024	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Banjaransari	17	14,91	17	13,60	18	13,95
2	Bendo	25	20,83	18	15,93	16	13,33
3	Tambakromo	23	15,03	21	17,07	18	12,00
4	Tungkulrejo	20	18,35	12	14,46	11	12,50
5	Bintoyo	7	12,07	7	12,50	7	10,94
6	Sukowiyono	33	18,64	28	16,37	21	12,14
7	Munggut	24	16,67	21	14,58	16	10,53
8	Pacing	37	22,02	30	21,90	24	15,58
9	Padas	18	18,37	13	13,27	12	13,79
10	Kedungprahu	25	16,56	21	14,29	16	10,74
11	Sambiroto	35	23,65	23	16,67	18	12,41
12	Kwadunganlor	33	20,75	27	15,08	23	12,92
<b>Kecamatan</b>		<b>297</b>	<b>18,57</b>	<b>238</b>	<b>15,72</b>	<b>200</b>	<b>12,59</b>

Pada tahun 2024, Kecamatan Padas telah memenuhi target nasional penurunan *stunting*, kecuali Desa Pacing yang masih mencatat angka 15,58%, tertinggi se-Kecamatan dan belum mencapai target nasional 14%. Hal ini menjadikan Desa Pacing sebagai lokus *stunting* yang memerlukan pendekatan kolaboratif. Model *Collaborative Governance* menjadi alternatif dalam menangani *stunting*, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui musyawarah dan pengelolaan jaringan sosial. Pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati Ngawi No. 223 Tahun 2021 serta Keputusan Kepala Desa Pacing Nomor 188/7/404.606.8 Tahun 2022 telah membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di Desa Pacing. Namun, masih terdapat kendala, terutama terkait kondisi ekonomi masyarakat dan pemahaman orang tua soal gizi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan kolaborasi antar aktor dalam tata kelola pemerintahan untuk mengurangi angka *stunting* di Desa Pacing, Kabupaten Ngawi.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, masih ditemukan belum optimalnya proses kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam implementasi *Collaborative Governance* untuk menurunkan angka *stunting* di Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Kolaborasi yang dimaksud seharusnya melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah desa, kader kesehatan, tenaga medis, hingga partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta. Namun, pada praktiknya, sinergi tersebut belum berjalan maksimal, sehingga belum tercipta integrasi yang utuh dalam pelaksanaan program penanganan *stunting*.

Disparitas angka prevalensi *stunting* juga menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Padas yang telah berhasil menurunkan prevalensi *stunting* di bawah target nasional sebesar 14%, Desa Pacing masih mencatat angka di atas ambang tersebut. Salah satu penyebab utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang berdampak pada rendahnya kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi anak dan mengakses layanan kesehatan secara memadai. Selain itu, masih minimnya kesadaran dan pemahaman orang tua mengenai pentingnya gizi seimbang dan perawatan anak sejak dini turut memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan kolaboratif yang lebih kuat dan berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat agar penanganan *stunting* di Desa Pacing dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis membandingkan dan mengkaji beberapa penelitian sebelumnya yang relevan sebagai dasar pembentukan kerangka teoritik dan identifikasi celah penelitian. Kajian dilakukan terhadap lima penelitian terdahulu yang mengangkat tema *Collaborative Governance* dalam konteks penurunan *stunting* di berbagai wilayah. Penelitian oleh Yuni Kurniasih et al. (2023) di Kabupaten Temanggung menyoroti proses *collaborative governance* dalam percepatan pencegahan *stunting*, dengan fokus pada pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi berjalan, masih terdapat hambatan internal seperti ketidakhadiran anggota forum karena kesibukan dan pergantian pegawai. Penelitian ini menggunakan teori dari Ansell & Gash serta Emerson, Nabatchi, dan Balogh.

Selanjutnya, Ipan dkk. (2021) meneliti pelaksanaan kolaborasi dalam penanganan *stunting* di UPTD Puskesmas Ciampel. Fokusnya terbatas pada proses kolaborasi antarpihak, tanpa menelaah aspek strategis atau kelembagaan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kolaborasi yang baik mampu mendorong semangat inovasi antar stakeholder. Penelitian oleh Nindya Tiara Fatikha dan Ane Permatasari (2023) lebih menitikberatkan pada kolaborasi antar kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Temuannya menunjukkan bahwa koordinasi vertikal antar lembaga masih belum optimal dalam menangani *stunting* secara terpadu. Sementara itu, Qori Hidayasa et al. (2023) melakukan studi di Kabupaten Bintan yang menilai proses *collaborative governance* dalam percepatan penurunan *stunting*. Meskipun mekanisme kerja sama telah terbentuk, strategi kolaborasi belum tersusun secara sistematis, dan pemahaman stakeholder terhadap perannya masih lemah. Terakhir, Toriq Dwi Citra Permata (2024) meneliti di Kabupaten Lamongan menggunakan pendekatan program “1-10-100”. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kolaborasi masih terhambat oleh ketimpangan peran antar pemangku kepentingan dan belum adanya SOP sebagai dasar kerja bersama.

Dari kelima penelitian tersebut, terdapat beberapa persamaan, terutama pada penggunaan teori *Collaborative Governance* dan pendekatan deskriptif kualitatif. Namun, perbedaan terletak pada lokus, fokus, dan kedalaman bahasan. Penelitian ini menempati posisi berbeda karena berfokus secara spesifik pada implementasi *collaborative governance* di tingkat desa, yakni Desa Pacing, dengan menekankan pada keaktifan, pola kerja, serta strategi kolaboratif para pemangku kepentingan lokal dalam upaya percepatan penurunan *stunting*. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam literatur, khususnya dalam konteks tata kelola kolaboratif di pemerintahan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Dalam karya ilmiah ini, penulis berfokus pada penerapan *collaborative governance* dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menyoroti bagaimana aktor-aktor lokal seperti pemerintah desa, puskesmas, kader posyandu, PKK, dan masyarakat berperan dalam proses kolaboratif, mulai dari dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, hingga komitmen bersama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program *stunting*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak dilakukan di tingkat kabupaten atau pusat, penelitian ini secara spesifik mengangkat konteks pemerintahan desa sebagai level terdekat dengan masyarakat, sekaligus sebagai ujung tombak pelaksanaan intervensi gizi dan kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fokus penulisan yang disajikan penulis berbeda dengan penulisan-penulisan sebelumnya. Penulis memadukan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008) yang terdiri atas empat dimensi utama yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi dengan pendekatan kontekstual berbasis desa sebagai unit pemerintahan terkecil. Kebaruan penelitian ini terletak pada eksplorasi mendalam terhadap dinamika kolaborasi di tingkat mikro (desa), serta bagaimana faktor lokal seperti kapasitas kader, struktur sosial masyarakat, dan dukungan lintas sektor memengaruhi efektivitas kolaborasi dalam upaya penurunan *stunting*.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana *collaborative governance* diterapkan dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Fokus utamanya adalah menggambarkan

keterlibatan para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya dalam proses kolaborasi, serta menilai sejauh mana kolaborasi tersebut efektif dalam menurunkan angka *stunting*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kolaborasi serta merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut guna memperkuat tata kelola kolaboratif di tingkat desa.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses *collaborative governance* dalam percepatan penurunan *stunting* di Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena Desa Pacing merupakan desa dengan prevalensi *stunting* tertinggi di Kecamatan Padas pada tahun 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari 9 orang yang mewakili unsur camat, kepala desa, perangkat desa, petugas puskesmas, kader posyandu, PKK, serta masyarakat yang menjadi sasaran program. **Instrumen penelitian** berupa pedoman wawancara semi-terstruktur, yang disusun berdasarkan empat dimensi teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008), yaitu: (1) kondisi awal, (2) desain kelembagaan, (3) kepemimpinan fasilitatif, dan (4) proses kolaborasi. **Analisis data** dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan metode.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji implementasi *collaborative governance* dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Desa Pacing Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, dengan menggunakan model teori dari Ansell dan Gash (2008) yang mencakup empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi.

### 3.1 Kondisi Awal

Penelitian ini menggambarkan kondisi awal pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam penurunan *stunting* di Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, berdasarkan model Ansell dan Gash (2008) yang mencakup tiga indikator utama: kondisi awal kolaborasi, kemampuan pemangku kepentingan, serta insentif dan kendala partisipatif. Kolaborasi antar pemangku kepentingan mulai terbentuk secara sistematis pasca-ditetapkannya Perpres No. 72 Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Ngawi tentang pembentukan TPPS. Sebelum intervensi formal, kesadaran terhadap isu *stunting* masih rendah dan pemahaman masyarakat masih terbatas. Seiring dengan adanya regulasi, program seperti *Orang Tua Asuh Anak Stunting*, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan edukasi gizi mulai dijalankan. Wawancara dengan Kepala Desa, bidan, dan Camat Padas menguatkan bahwa kolaborasi lintas sektor semakin terkoordinasi melalui TPPS dan forum musyawarah.

Dari segi kemampuan pemangku kepentingan, Pemerintah Desa, TPPS, kader Posyandu, PKK, serta tenaga kesehatan memainkan peran aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Tantangan utama terletak pada koordinasi lintas pihak dan rendahnya pemanfaatan digitalisasi data seperti EHDW. Namun, terdapat komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, edukasi, dan pemantauan rutin terhadap balita. Terkait insentif

partisipatif, pemerintah kabupaten mendorong APBDes mengalokasikan dana khusus untuk program *stunting*. Penghargaan bagi kader dan keluarga partisipatif, seperti melalui program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), menjadi motivasi tambahan. Meski demikian, keterbatasan ekonomi dan pola asuh tradisional masih menjadi kendala utama partisipasi aktif masyarakat. Secara keseluruhan, kondisi awal di Desa Pacing mencerminkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh penguatan kapasitas lokal, sinergi antaraktor, serta pendekatan yang adaptif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat desa.

### **3.2 Desain Kelembagaan**

Desain kelembagaan menjadi elemen penting dalam penerapan *Collaborative Governance* dalam percepatan penurunan *stunting* di Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Berdasarkan model Ansell dan Gash (2008), desain kelembagaan mencakup empat indikator utama, yaitu kejelasan aturan, transparansi proses, inklusivitas partisipatif, dan eksklusivitas forum. Pertama, *kejelasan aturan* diwujudkan melalui regulasi formal dari tingkat nasional hingga desa. Dimulai dari Perpres No. 72 Tahun 2021, regulasi ini diturunkan ke dalam Perbup Ngawi No. 223 Tahun 2021 (dan revisinya), serta SK Kepala Desa Pacing tentang pembentukan TPPS desa. Aturan-aturan ini menjamin adanya struktur organisasi yang jelas dan koordinasi yang sistematis antar pemangku kepentingan, termasuk perangkat desa, kader, tenaga kesehatan, PKK, dan tokoh masyarakat. Kedua, *transparansi proses* dijalankan dengan keterbukaan informasi publik, khususnya melalui program “Orang Tua Asuh Balita *Stunting*.” Data balita dan pendampingnya dipublikasikan secara terbuka dalam forum TPPS, Musyawarah Masyarakat Desa, dan koordinasi lintas sektor. Hal ini memperkuat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Ketiga, *inklusivitas partisipatif* ditunjukkan melalui pelibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan program, dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Program ini mengedepankan peran keluarga, kader Posyandu, TP PKK, dan tokoh masyarakat secara sinergis. TPPS desa didesain sebagai tim koordinatif yang menjembatani antara kebijakan desa dan implementasi lapangan, dengan dukungan penuh dari pemerintah desa dan tenaga kesehatan.

Pada *eksklusivitas forum* masih menjadi tantangan. Hingga saat ini, forum kolaboratif seperti rapat TPPS dan musyawarah desa lebih banyak didominasi oleh unsur pemerintah dan kader. Partisipasi dari sektor swasta, dunia usaha, serta organisasi non-pemerintah belum terlibat secara aktif. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan jejaring lintas sektor agar forum kolaboratif dapat lebih inklusif dan berdaya jangkauan luas. Secara keseluruhan, desain kelembagaan di Desa Pacing telah menunjukkan struktur yang relatif kuat dan terarah dalam mendukung kolaborasi multipihak. Namun, untuk mencapai efektivitas jangka panjang, perlu diperkuat partisipasi lintas sektor secara lebih menyeluruh, serta peningkatan kualitas forum agar lebih terbuka dan representatif bagi seluruh elemen masyarakat.

### **3.3 Kepemimpinan Fasilitatif**

Kepemimpinan Kepala Desa dan Camat Padas sangat menentukan keberhasilan kolaborasi. Mereka berperan aktif dalam memfasilitasi komunikasi lintas sektor dan mendorong partisipasi masyarakat. Meski demikian, koordinasi belum sepenuhnya optimal di semua bidang, terutama dalam konsolidasi program antar instansi. Dengan fokus pada peran pemangku kepentingan dalam menginisiasi dialog, mengarahkan proses kolaboratif, serta memberdayakan pihak-pihak yang terlibat. Pada dimensi komitmen pemimpin menjadi fondasi utama dalam percepatan penurunan *stunting* di Desa Pacing. Kepala Desa, TP PKK, dan tenaga

kesehatan menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program melalui aksi langsung, pengambilan kebijakan strategis, serta pengalokasian dana dari APBDes untuk kegiatan seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), insentif kader, dan edukasi masyarakat. Komitmen ini tercermin dalam integrasi isu *stunting* ke dalam dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes), serta dalam sinergi antara pemerintah desa dan sektor kesehatan.

Koordinasi lintas sektor telah berjalan secara rutin dan fleksibel melalui berbagai forum seperti rapat TPPS, Musyawarah Desa, grup komunikasi lintas sektor, serta forum kecamatan yang dipimpin oleh Camat Padas. Koordinasi melibatkan unsur pemerintah, kader, PKK, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat. Meskipun kolaborasi dengan sektor swasta belum optimal, pemerintah desa mulai menjajaki kemitraan dengan klinik dan lembaga sosial sebagai bagian dari perluasan jejaring kolaborasi. Dimensi pemberdayaan stakeholder dilakukan melalui pelatihan Electronic Human Development Worker (EHDW) bagi TPPS, kader Posyandu, PPKBD, dan bidan desa. Pelatihan ini meningkatkan kapasitas teknis dalam pendataan keluarga berisiko *stunting*, pemanfaatan sistem digital untuk pemantauan gizi, dan pemahaman intervensi berbasis data. Pendekatan ini memperkuat keberlanjutan kolaborasi dengan meningkatkan literasi digital dan teknis bagi pelaksana di lapangan. Secara keseluruhan, dimensi kepemimpinan fasilitatif di Desa Pacing memperlihatkan sinergi yang kuat antara visi kepemimpinan, koordinasi antarpihak, dan strategi pemberdayaan yang mendorong implementasi *Collaborative Governance* secara adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam penurunan *stunting* di tingkat desa.

### 3.4 Proses Kolaborasi

Dalam konteks percepatan penurunan *stunting* di Desa Pacing, proses ini terwujud melalui mekanisme formal dan informal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pertama, dialog antar stakeholder dilakukan secara rutin melalui forum Musyawarah Desa, Mini Lokakarya Lintas Sektor, serta koordinasi harian antar pihak seperti pemerintah desa, TPPS, kader Posyandu, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Dialog ini menjadi wadah pertukaran data, perumusan strategi, serta pemantauan intervensi seperti program *Orang Tua Asuh* dan PMT. Keterbukaan dan partisipasi aktif dalam forum tersebut memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif. Kedua, pembangunan kepercayaan terbentuk melalui transparansi data, konsistensi peran antar aktor, serta pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan program. Warga merasa didampingi, bukan hanya diberi instruksi, sehingga meningkatkan responsivitas terhadap program.

Komitmen pimpinan desa, dukungan TP PKK, serta sinergi dengan tenaga kesehatan menjadi faktor penguat dalam membangun kepercayaan lintas aktor. Ketiga, kesepahaman bersama tercapai melalui musyawarah yang menyatukan persepsi seluruh pihak bahwa *stunting* adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya urusan sektor kesehatan. Hal ini tercermin dari komitmen pemerintah desa dalam penganggaran, keterlibatan kader dalam edukasi, serta keikutsertaan ASN sebagai orang tua asuh. Forum ini juga memperkuat koordinasi dan distribusi peran dalam pendampingan keluarga berisiko. Keempat, capaian hasil kolaborasi ditunjukkan melalui perbaikan status gizi 11 dari 24 balita (45,8%) yang terlibat dalam program *Orang Tua Asuh* antara Desember 2024–Januari 2025. Meski 8 balita tetap dan 5 balita mengalami penurunan berat badan, capaian ini menjadi “*small wins*” yang menandai arah positif dalam pelaksanaan kolaborasi. Data ini juga menjadi dasar evaluasi dan penyesuaian intervensi. Secara keseluruhan, proses kolaborasi di Desa Pacing mencerminkan pelaksanaan *Collaborative Governance* yang efektif, di mana struktur komunikasi, komitmen lintas sektor,

dan pelibatan aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Meskipun masih terdapat tantangan, proses ini telah memberikan landasan kuat untuk pembangunan program yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil nyata dalam menurunkan angka *stunting*.

### **3.5 Faktor Penghambat Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Pacing**

Meskipun pendekatan *Collaborative Governance* telah diterapkan dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Desa Pacing, sejumlah faktor penghambat masih memengaruhi efektivitas program. Penghambat tersebut berasal dari keterbatasan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan dukungan lintas sektor. Rendahnya literasi masyarakat mengenai *stunting* menjadi hambatan utama. Banyak warga belum memahami bahwa *stunting* bukan sekadar masalah pertumbuhan fisik, tetapi berpengaruh terhadap perkembangan kognitif dan kualitas hidup anak di masa depan. Kurangnya kesadaran ini berdampak pada rendahnya partisipasi ke posyandu dan minimnya perhatian terhadap asupan gizi.

Selain itu keterlibatan sektor swasta dan dunia usaha masih sangat minim. Belum ada kontribusi nyata dalam bentuk program CSR atau dukungan logistik dari pelaku usaha lokal, padahal peran mereka dapat memperkuat intervensi sensitif seperti penyediaan makanan tambahan dan sanitasi lingkungan. Begitu juga tingginya angka kemiskinan di desa, di mana mayoritas keluarga tergolong miskin, menjadi faktor struktural yang menghambat pemenuhan kebutuhan gizi, akses layanan kesehatan, dan penerapan pola hidup sehat secara mandiri. Faktor-faktor penghambat ini menunjukkan bahwa selain penguatan kelembagaan dan regulasi, keberhasilan program *stunting* juga sangat dipengaruhi oleh pendekatan sosial, edukatif, dan ekonomi yang terintegrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi multisektor yang adaptif terhadap kondisi lokal untuk memastikan dampak yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

### **3.6 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat**

Dalam menjawab berbagai tantangan implementasi program percepatan penurunan *stunting*, para pemangku kepentingan di Desa Pacing telah mengembangkan strategi penanggulangan yang bersifat praktis, adaptif, dan berbasis komunitas. Strategi ini melibatkan elemen pemerintah desa, TP PKK, kader posyandu, tenaga kesehatan, serta masyarakat secara luas. Untuk mengatasi rendahnya literasi masyarakat, TP PKK bersama bidan desa dan kader rutin mengadakan penyuluhan melalui forum seperti dasawisma, kelas ibu hamil, dan pengajian ibu-ibu. Penyuluhan dilakukan dengan pendekatan visual dan praktik langsung seperti demo memasak makanan bergizi dari bahan lokal (tempe, daun kelor, telur), serta simulasi pengukuran tinggi badan. Edukasi juga mencakup teknologi tepat guna, seperti cara penyimpanan makanan dan pembuatan alat ukur sederhana. Menyikapi keterbatasan sumber daya manusia, pemerintah desa membentuk relawan desa sehat untuk mendukung kader dalam distribusi PMT, edukasi rumah ke rumah, serta pendampingan keluarga berisiko. Insentif kader juga dialokasikan melalui dana desa untuk memotivasi dan mengapresiasi peran mereka dalam pelayanan kesehatan.

Guna menjawab minimnya keterlibatan sektor swasta, Pemerintah Desa melalui TPPS dan BPD mulai mendorong pembentukan kemitraan CSR lokal dengan koperasi, BUMDes, dan pengusaha desa. Upaya ini masih dalam tahap penjajakan melalui pendekatan informal dan direncanakan akan diformalisasi dalam Musyawarah Desa Tahun 2025. Strategi ini menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak dan inovasi lokal menjadi kekuatan utama dalam menjawab hambatan struktural dan sosial. Pendekatan berbasis komunitas yang

mengedepankan partisipasi, pemberdayaan, dan pemanfaatan sumber daya lokal menjadi fondasi penting bagi keberhasilan jangka panjang program penurunan *stunting* di Desa Pacing.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan *Collaborative Governance* dalam percepatan penurunan *stunting* di Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, dapat disimpulkan bahwa model tata kelola kolaboratif telah berjalan cukup efektif meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Kolaborasi antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, TPPS, kader Posyandu, tenaga kesehatan, TP PKK, serta masyarakat, membentuk suatu pola kerja yang partisipatif dan saling melengkapi dalam pelaksanaan berbagai program intervensi *stunting*. Program seperti "Orang Tua Asuh Anak *Stunting*", pemberian makanan tambahan (PMT), serta edukasi gizi dan kesehatan menjadi bentuk nyata dari integrasi peran dan sinergi antar aktor di tingkat lokal. Desain kelembagaan yang tertuang dalam regulasi dari tingkat nasional hingga desa telah menciptakan struktur kolaborasi yang relatif kuat, ditandai dengan kejelasan aturan, transparansi data, serta partisipasi masyarakat yang mulai aktif, meskipun masih didominasi oleh unsur pemerintahan dan belum sepenuhnya melibatkan sektor swasta.

Kepemimpinan fasilitatif Kepala Desa dan Camat Padas turut menjadi faktor penentu keberhasilan kolaborasi, khususnya dalam hal menginisiasi dialog, mendorong koordinasi lintas sektor, dan menggerakkan kader serta masyarakat untuk terlibat secara aktif. Proses kolaborasi yang berlangsung meliputi forum dialog rutin, musyawarah desa, dan mini lokakarya lintas sektor, yang tidak hanya menjadi wadah pertukaran informasi, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan bersama terhadap isu *stunting*. Kepercayaan antar aktor terbangun melalui transparansi dalam pelaksanaan program dan konsistensi peran, sehingga tercipta kesepahaman bahwa *stunting* bukan sekadar masalah kesehatan, melainkan isu sosial dan pembangunan desa yang memerlukan tanggung jawab kolektif.

Hasil dari proses kolaborasi ini menunjukkan kemajuan positif, seperti adanya peningkatan status gizi pada sebagian besar balita yang masuk dalam program Orang Tua Asuh, yang menjadi indikator keberhasilan awal (*small wins*) dalam konteks implementasi kebijakan publik berbasis kolaborasi. Namun, di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor penghambat, di antaranya rendahnya literasi masyarakat mengenai *stunting* serta minimnya keterlibatan sektor swasta dan dunia usaha dalam mendukung program. Tingginya tingkat kemiskinan dan budaya pola asuh tradisional turut memperparah kompleksitas persoalan. Sebagai bentuk respon terhadap tantangan tersebut, para pemangku kepentingan di Desa Pacing telah menyusun berbagai strategi adaptif seperti edukasi berbasis praktik, pembentukan relawan desa sehat, pengalokasian dana desa untuk insentif kader, serta penajakan kemitraan dengan pelaku usaha lokal melalui inisiatif CSR. Pendekatan berbasis komunitas dan pemberdayaan lokal menjadi kekuatan utama dalam memastikan keberlanjutan program. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Collaborative Governance* di Desa Pacing mampu memperkuat efektivitas tata kelola penurunan *stunting*, asalkan didukung oleh komitmen lintas sektor yang kuat, keterbukaan informasi, serta perluasan kolaborasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu desa saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Cresswel.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan *Collaborative Governance* dalam upaya penurunan *stunting* di Desa Pacing Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Padas, Kepala Desa Pacing beserta jajaran, Ketua TP PKK Desa Pacing dan Bidan Desa Pacing yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. <https://www.bappenas.go.id/>
- Budiman, M.A.P. (2024). Collaborative Governance Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kota Palembang (Skripsi Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Repository IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/19533/>
- De Onis, M., Branca, F., & Blössner, M. (2010). Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. *Bulletin of the World Health Organization*, 88(9), 660–667. <https://doi.org/10.2471/BLT.07.043497>
- Dwi, A., Zainudin, F., & Hayati, L. (2019). Faktor risiko stunting pada balita. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 10(1), 1–7. <https://doi.org/10.22435/kespro.v10i1.1225>
- Dwi, R. M., Kurniasari, N., & Susanti, I. (2019). Hubungan antara tingkat kecukupan gizi dengan kejadian stunting pada balita. *Jurnal Kesehatan*, 10(2), 95–100. <https://doi.org/10.33024/jikk.v6i2.2120>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fatikha, N. T., & Permatasari, A. (2023). Kolaborasi antar kementerian dalam penanganan stunting di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 123–134. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8308>
- Head, B. W., & Alford, J. (2015). Wicked problems: Implications for public policy and management. *Administration & Society*, 47(6), 711–739. <https://doi.org/10.1177/0095399713481601>
- Hidayasa, Q., Wijayanto, A., & Mufidah, S. (2023). Collaborative governance dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bintan. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 10(1), 55–67. <https://doi.org/10.46730/japs.v4i2.107>
- Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 157.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 67.

- Ipan, I., Nurlaela, L., & Supardi, D. (2021). Kolaborasi penanganan stunting di UPTD Puskesmas Ciampel. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 9(1), 45–58. <https://doi.org/10.29264/jkin.v18i3.9665>
- Juniati, D., Rizki, A., & Saraswati, H. (2023). Strategi intervensi gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. *Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, 8(1), 12–20. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i1.20039>
- Kurniasih, Y., Santoso, B., & Hidayat, R. (2023). Proses Collaborative Governance dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Temanggung. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 18(2), 78–91. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v7i1.7438>
- Kusharisupeni. (2002). Pengaruh Stunting Terhadap Kecerdasan dan Prestasi Anak Sekolah Dasar. *Majalah Kedokteran Indonesia*, 52(1), 17–21.
- Labolo, M. (2014). Tata Kelola Pemerintahan: Pendekatan pada sektor publik dan non-profit. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lewit, E. M. (1997). Children in poverty: Trends, consequences, and policy options. *The Future of Children*, 7(2), 154–167.
- Lubis, F., Sari, D., & Widya, P. (2023). Evaluasi Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022 dan 2023. *Buletin Gizi Indonesia*, 2(1), 45–53.
- Nur Amanda, R. (2023). Strategi nasional percepatan penurunan stunting di Indonesia: Studi analisis kebijakan. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 11(1), 33–42.
- Nwanko, C. O., & Aiyeku, J. F. (2020). Collaborative governance as a strategy for improving public health delivery in developing countries: A Nigerian perspective. *International Journal of Public Administration*, 43(4), 309–319. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1627556>
- Pemerintah Kabupaten Ngawi. (2021). *Peraturan Bupati Ngawi Nomor 223 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Ngawi*.
- Pemerintah Desa Pacing. (2022). *Keputusan Kepala Desa Pacing Nomor 188/7/404.606.8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa Pacing*.
- Permata, T. D. C. (2024). *Collaborative Governance Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Lamongan (Skripsi Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri)*. Fakultas Politik Pemerintahan Program Studi Kebijakan Publik. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19360>
- Rasanathan, K., Bennett, S., Atkins, V., Beschel, R., & Carrasco, M. (2017). Governing multisectoral action for health in low- and middle-income countries. *PLOS Medicine*, 14(4), e1002285. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002285>
- Rukmana, A. A. (2020). *Model Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(1), 23–38. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i1.1120>
- Simangunsong, F. (2021). *Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penanggulangan Stunting melalui Collaborative Governance di Kabupaten Sumba Barat Daya*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(2), 55–72. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.1891>
- Unicef. (2013). *Improving child nutrition: The achievable imperative for global progress*. United Nations Children's Fund (UNICEF). [https://www.unicef.org/publications/index\\_68661.html](https://www.unicef.org/publications/index_68661.html)